



PKH KAB. BADUNG

16.12.2022 12:35

-8 47461, 115 21908

Selat anyar desa selat, G6GC+827, Sangeh, Abiansema, Bali

# LAPORAN KINERJA 2022

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBERDAYAAN SOSIAL



dayasosbisa



dayasosbisa



Direktorat Jenderal  
Pemberdayaan Sosial

**KATA PENGANTAR**  
**SEKRETARIS DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL**

*"Pantang Tugas Tak Tuntas"*

**BENI SUJANTO.**





Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program dan anggaran Dukungan Manajemen pada unit kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial tahun 2022, perlu disusun Laporan Kinerja (LKj) yang menyajikan informasi capaian kinerja sepanjang tahun 2022.

Selain berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran, LKj ini juga menjadi bahan masukan untuk perbaikan dimasa mendatang. Secara garis besar, LKj ini memberikan gambaran tentang, struktur organisasi, sumber daya, isu strategis, perencanaan kinerja, capaian kinerja, kesimpulan dan rekomendasi.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial telah disusun, semoga bermanfaat.

LKJ disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 27 Februari 2023



Beni Sujanto





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 dapat dilihat dari 5 Sasaran Kegiatan (SK) sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja tersebut diukur melalui 14 indikator kinerja kegiatan (IKK).

Di tahun 2022, Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial mengalami revisi disebabkan oleh 2 hal:

1. Adanya pergantian kepemimpinan di internal Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial;
2. Adanya penyeragaman indikator kinerja di seluruh unit kerja Sekretariat lingkup Kementerian Sosial;

# SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial

## INDIKATOR KEGIATAN 1

Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial

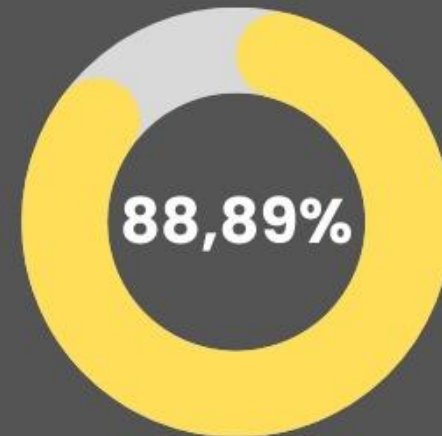
**Target**

**90**

**Realisasi**

**80,49**

**Capaian**



## SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik UKE 1

## INDIKATOR KEGIATAN 2

Persentase (%) layanan komunikasi dan informasi publik pemberdayaan sosial yang optimal

**Target**

**100**

**Realisasi**

**100**

**Capaian**

**100%**

## 9 INDIKATOR KINERJA

### Sasaran Kinerja 3:

Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum.

**Indikator 1**  
Nilai Akuntabilitas Kinerja  
Sekretariat Pemberdayaan Sosial

Target	Realisasi
82	77,51



**Indikator 4**  
(%) Satuan Kerja yang mengisi  
aplikasi Pemantauan tepat waktu

Target	Realisasi
82	100



**Indikator 7**  
Tingkat kepatuhan pengelolaan  
BMN

Target	Realisasi
100	100



**Indikator 2**  
Nilai SMART Sekretariat  
Pemberdayaan Sosial

Target	Realisasi
87	97,77



**Indikator 5**  
(%) rekomendasi temuan yang  
ditindaklanjuti

Target	Realisasi
100	100



**Indikator 8**  
Nilai evaluasi pengawasan internal  
kearsipan

Target	Realisasi
66	57,90



**Indikator 3**  
Nilai IKPA Sekretariat  
Pemberdayaan Sosial

Target	Realisasi
87	91,50



**Indikator 6**  
Tingkat kepatuhan pengadaan  
barang dan jasa

Target	Realisasi
100	100



**Indikator 9**  
Jumlah Satker yang Memenuhi  
Standar untuk diusulkan mendapat  
Predikat WBK/WBBM

Target	Realisasi
1	0





# SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM UKEI

## INDIKATOR KEGIATAN 4.1

Persentase (%) layanan komunikasi dan informasi publik pemberdayaan sosial yang optimal

Target

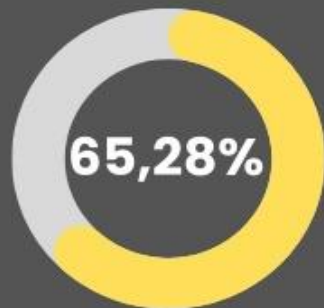
88

Realisasi

57,45

Capaian

65,28%



## INDIKATOR KEGIATAN 4.2

Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Pemberdayaan Sosial

Target

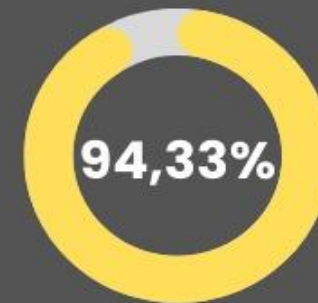
81

Realisasi

76,33

Capaian

94,33%





## SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya kualitas layanan Legislasi dan Ligitasi UKEI (%) naskah hukum

## INDIKATOR KEGIATAN 5

Persentase (%) naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan

**Target**

**100**

**Realisasi**

**1.194**

**Capaian**

**100%**

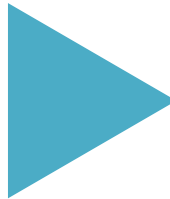


# DAFTAR ISI



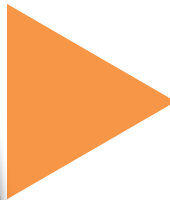
## BAB I. PENDAHULUAN

- 12. Latar Belakang
- 13. Gambaran Umum Organisasi
- 15. Aspek Strategis Organisasi
- 17. Isu Strategis Organisasi
- 18. Sistematika Penyajian



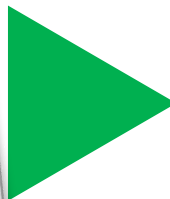
## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 20. Perencanaan Strategis
- 24. Rencana Kerja Tahun 2022



## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 27. Capaian Kinerja
- 71. Realisasi Anggaran



## BAB IV. PENUTUP

- 75. Kesimpulan
- 76. Saran



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## A. LATAR BELAKANG



Laporan Kinerja merupakan salah satu wujud akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai misi dengan sasaran/target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi Pemerintah perlu menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sesuai dengan hal tersebut maka Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Sosial menyusun dan melaporkan kegiatan-kegiatan dan penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran dan target berbentuk Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022.

Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Dayasos merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Ditjen Dayasos, yang mana isinya antara lain laporan tentang kegiatan yang sudah dilakukan dalam membawa misi organisasi, dalam hal ini terkait dengan tugas kesekretariatan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selama Tahun Anggaran 2022.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial TA 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial selama tahun 2022, juga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.



Dasar hukum organisasi Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial adalah Permensos Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah melalui Permensos Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas **Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial**.



## B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### TUGAS



Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Pelaksanaan tugas ini lebih lanjut diarahkan pengembangan dan pembinaan kesadaran, kemampuan, kompetensi, tanggung jawab dan peran aktif aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

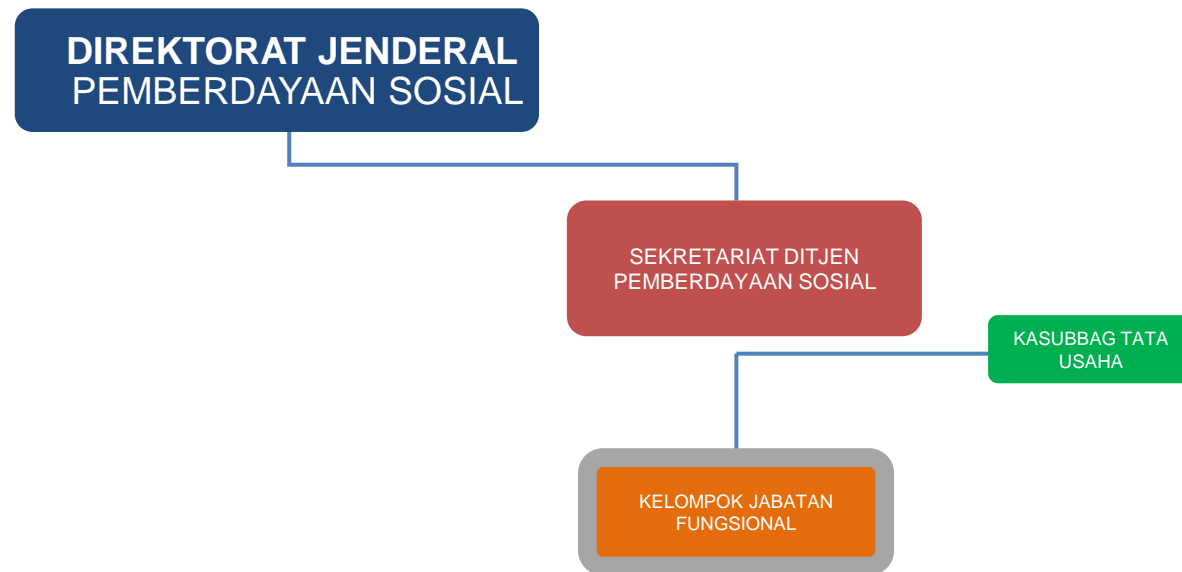
### FUNGSI



- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; Pengelolaan urusan keuangan;
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
- Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, dan pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat; Pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana, hukum dan hubungan masyarakat;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha

## STUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut :



## C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

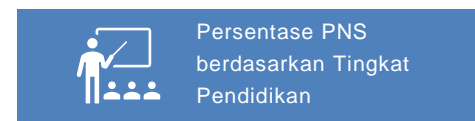
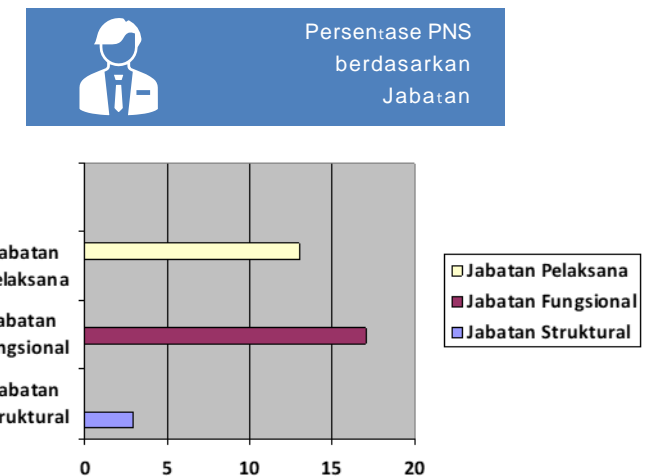
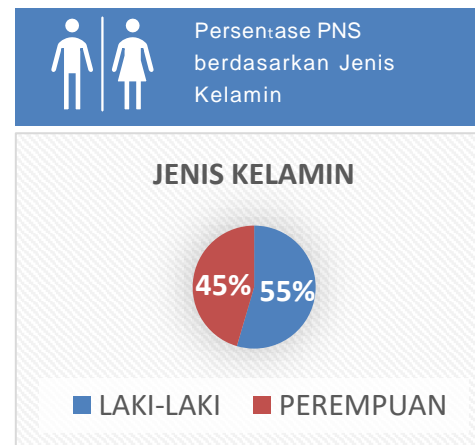
### ASPEK TUGAS

Sekretariat Ditjen Dayasos mendapat tugas sebagai :

- ✓ Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program pemberdayaan sosial.
- ✓ Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
- ✓ Publikasi lebih massif
- ✓ Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Dayasos
- ✓ Peningkatan pelayanan persuratan secara online.

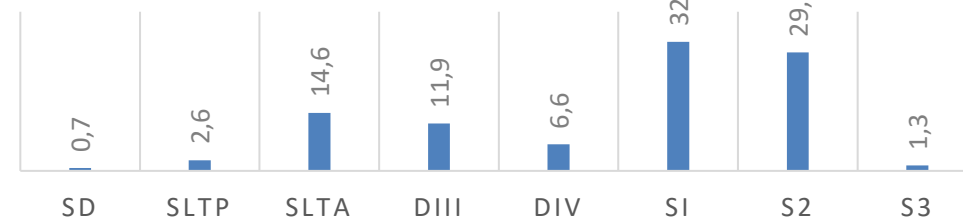
### ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai data Subbagian Kepegawaian per 31 Desember 2021, Pegawai Sekretariat Dayasos sebanyak 51 Orang yang terdiri dari 18 orang PPNPN dan 33 orang PNS.



TINGKAT PENDIDIKAN

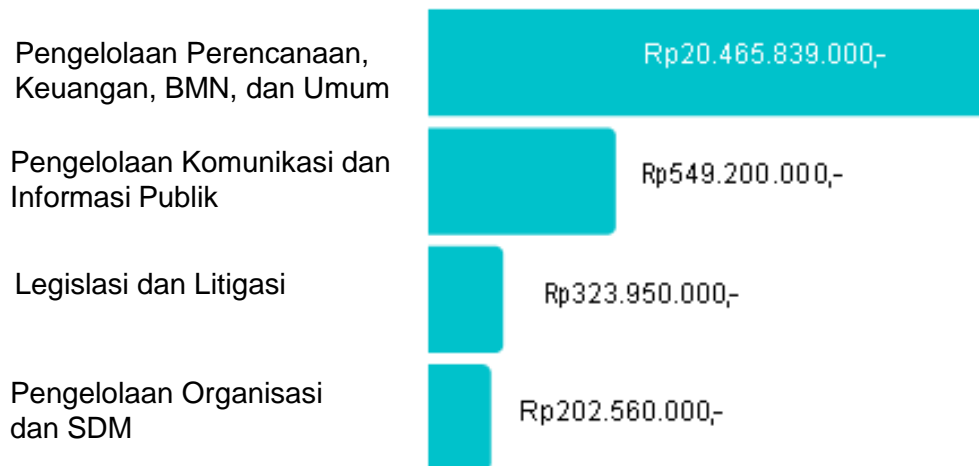
■ PERSENTASE



## ASPEK ANGGARAN

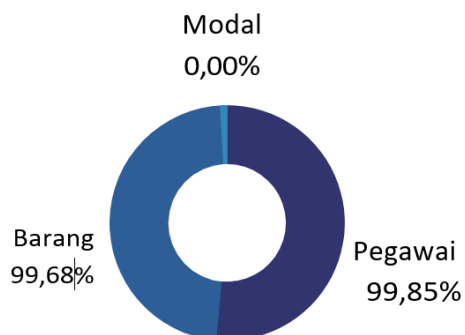


Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial pada tahun 2022 mendapatkan anggaran melalui APBN sebesar **Rp21.541.549.000,-** dengan rincian seperti grafik berikut.

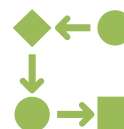


Anggaran Sekretariat Ditjen Dayasos terbagi menjadi 4 Kegiatan. Porsi terbesar pada kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum.

*Persentase Anggaran berdasarkan jenis belanja*



## ASPEK TATA LAKSANA

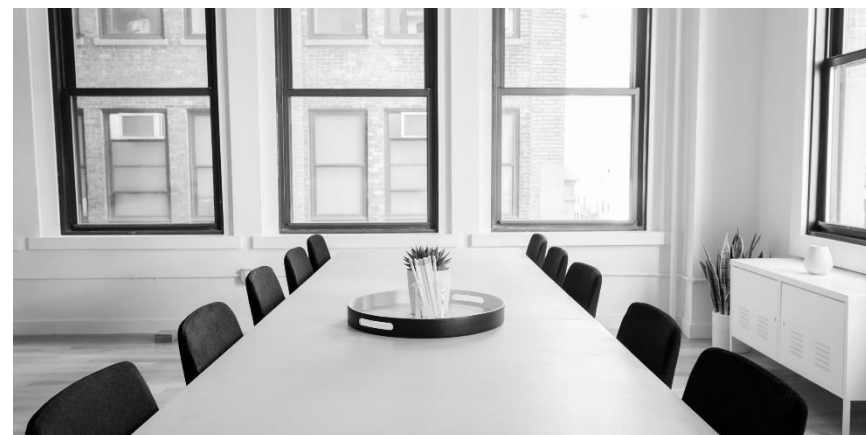


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh aktivitas pekerjaan. Pada tahun 2022 terdapat reviu SOP atas kegiatan yang mengalami perubahan mendasar.

## ASPEK SARANA DAN PRASARANA



Dalam pelaksanaan aktivitas kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial didukung oleh sarana yaitu perlengkapan komputer, printer, foto copy, scanner dan alat tulis kantor. Serta didukung oleh prasarana ruang kerja yang dapat menampung seluruh pegawai, ruang kerja pimpinan eselon I - II, meja kerja, kursi, pendingin udara dan kendaraan dinas.





## D. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Ditjen Dayasos yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, terdapat tantangan dan permasalahan baik dari sisi eksternal maupun internal. Isu-isu penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial antara lain:



Pengalihan jabatan struktural eselon IV menjadi Pejabat Fungsional merangkap Sub Koordinator dan eselon III menjadi Pejabat Fungsional merangkap koordinator.



Penyeragaman indikator kinerja semua Sekretariat lingkup Kemensos.



Formasi pada Peta jabatan di masing-masing bagian belum terisi semua.



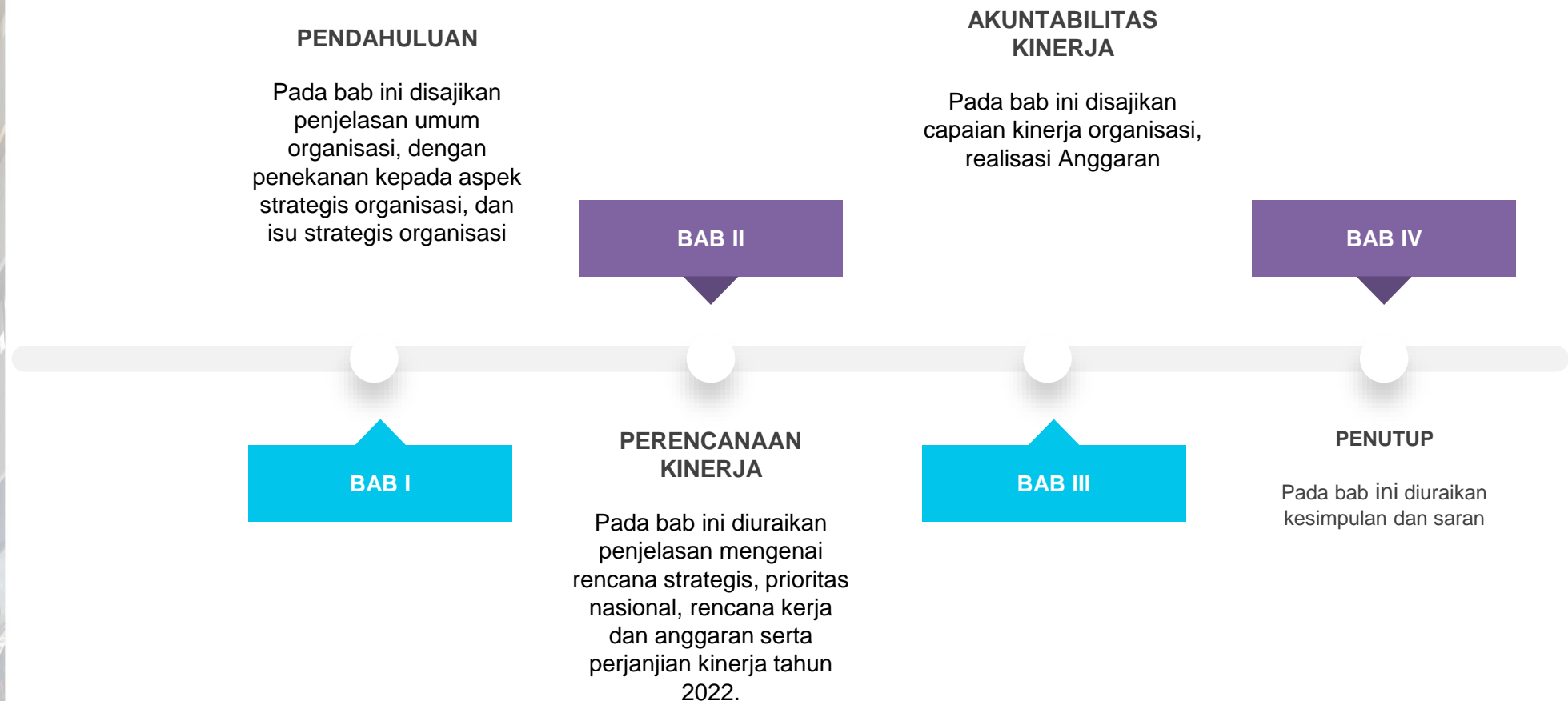
Penerapan kebijakan Presiden tentang Bantuan Sosial (BLT BBM)



Berdasarkan isu-isu tersebut, Sekretariat Ditjen Pemberdayaan merumuskan kegiatan yang merujuk pada Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran. Dengan Indikator kinerja yang terukur, yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian laporan kinerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:





## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

## A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Sosial menyusun Rencana Strategi (Renstra) untuk periode tahun 2020 – 2024 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 406/DYS.I/KPTS/07/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis tersebut telah di reviu pada Tahun 2022 untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.





# PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DAYASOS

**TAHUN 2022**

Di tahun 2022, Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial mengalami revisi disebabkan oleh 2 hal:

1. Adanya pergantian kepemimpinan di internal Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial;
2. Adanya penyeragaman indikator kinerja di seluruh unit kerja Sekretariat lingkup Kementerian Sosial;

## Semula

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1 Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	1. Nilai Kepuasan stakeholder terhadap layanan Sekretariat Ditjen Dayasos	90
2 Meningkatnya kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik UKE 1	1. Persentase (%) layanan komunikasi dan informasi publik pemberdayaan sosial yang optimal	100
3 Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan umum UKE1	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Pemberdayaan Sosial	82
	2. Nilai SMART Sekretariat Pemberdayaan Sosial	87
	3. Nilai IKPA Sekretariat Pemberdayaan Sosial	87
	4. Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi Pemantauan tepat waktu	82
	5. Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100
	6. Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa	100
	7. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN	100
	8. Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan	66
	9. Jumlah Satuan Kerja yang Memenuhi Standar untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	1
4 Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM UKE1	1. Nilai profesionalitas ASN Ditjen Pemberdayaan Sosial	88
	2. Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Pemberdayaan Sosial	81
5 Meningkatnya kualitas layanan Legislasi dan Litigasi UKE1	Persentase (%) naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan	100

## Menjadi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1 Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	1. Nilai Kepuasan stakeholder terhadap layanan Sekretariat Ditjen Dayasos	90
2 Meningkatnya kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik UKE 1	1. Persentase (%) layanan komunikasi dan informasi publik pemberdayaan sosial yang optimal	100
3 Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan umum UKE1	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Pemberdayaan Sosial	82
	2. Nilai SMART Sekretariat Pemberdayaan Sosial	87
	3. Nilai IKPA Sekretariat Pemberdayaan Sosial	87
	4. Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi Pemantauan tepat waktu	82
	5. Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100
	6. Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa	100
	7. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN	100
	8. Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan	66
	9. Jumlah Satuan Kerja yang Memenuhi Standar untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	1
4 Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM UKE1	1. Nilai profesionalitas ASN Ditjen Pemberdayaan Sosial	88
	2. Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Pemberdayaan Sosial	81
5 Meningkatnya kualitas layanan Legislasi dan Litigasi UKE1	Persentase (%) naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan	100

# PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DAYASOS

**TAHUN 2022**

Tidak ada perbedaan dalam sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja dalam perubahan perjanjian Kinerja, yang hanya dalam Rincian Anggaran dan DIPA dalam Sekretariat Ditjen Dayasos, dari yang semula 47.258.457.000 menjadi 21.541.549.000. seperti sebagai berikut:

## Semula

Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemberdayaan Sosial	Rp. 1,016,947,000
Layanan Hubungan Masyarakat	Rp. 1,016,947,000
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pemberdayaan Sosial	45,474,245,000
a. Layanan BMN	Rp. 596,380,000
b. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp. 300,430,000
c. Layanan Umum	Rp. 410,150,000
d. Layanan Perkantoran	Rp. 40,237,069,000
e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 1,024,107,000
f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 403,674,000
g. Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 1,659,465,000
h. Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 541,730,000
i. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp. 301,240,000
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Pemberdayaan Sosial	Rp. 365,965,000
a. Manajemen SDM	Rp. 265,735,000
b. Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 100,230,000
4. Legislasi dan Litigasi Pemberdayaan Sosial Layanan Hukum	Rp. 401,300,000 Rp. 401,300,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 47.258.457.000</b>

Jakarta, Mei 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



Edi Suharto

Pihak Pertama,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pemberdayaan Sosial



Beni Sujanto

## Menjadi

Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemberdayaan Sosial	Rp. 549,200,000
Layanan Hubungan Masyarakat	Rp. 549,200,000
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pemberdayaan Sosial	Rp. 20,465,839,000
a. Layanan BMN	Rp. 426,722,000
b. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp. 168,920,000
c. Layanan Umum	Rp. 476,790,000
d. Layanan Perkantoran	Rp. 15,815,482,000
e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 1,619,921,000
f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 313,590,000
g. Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 1,302,794,000
h. Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 213,480,000
i. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp. 128,140,000
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Pemberdayaan Sosial	Rp. 202,560,000
a. Manajemen SDM	Rp. 106,810,000
b. Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 95,750,000
4. Legislasi dan Litigasi Pemberdayaan Sosial Layanan Hukum	Rp. 323,950,000 Rp. 323,950,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 21,541,549,000</b>

Jakarta, September 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



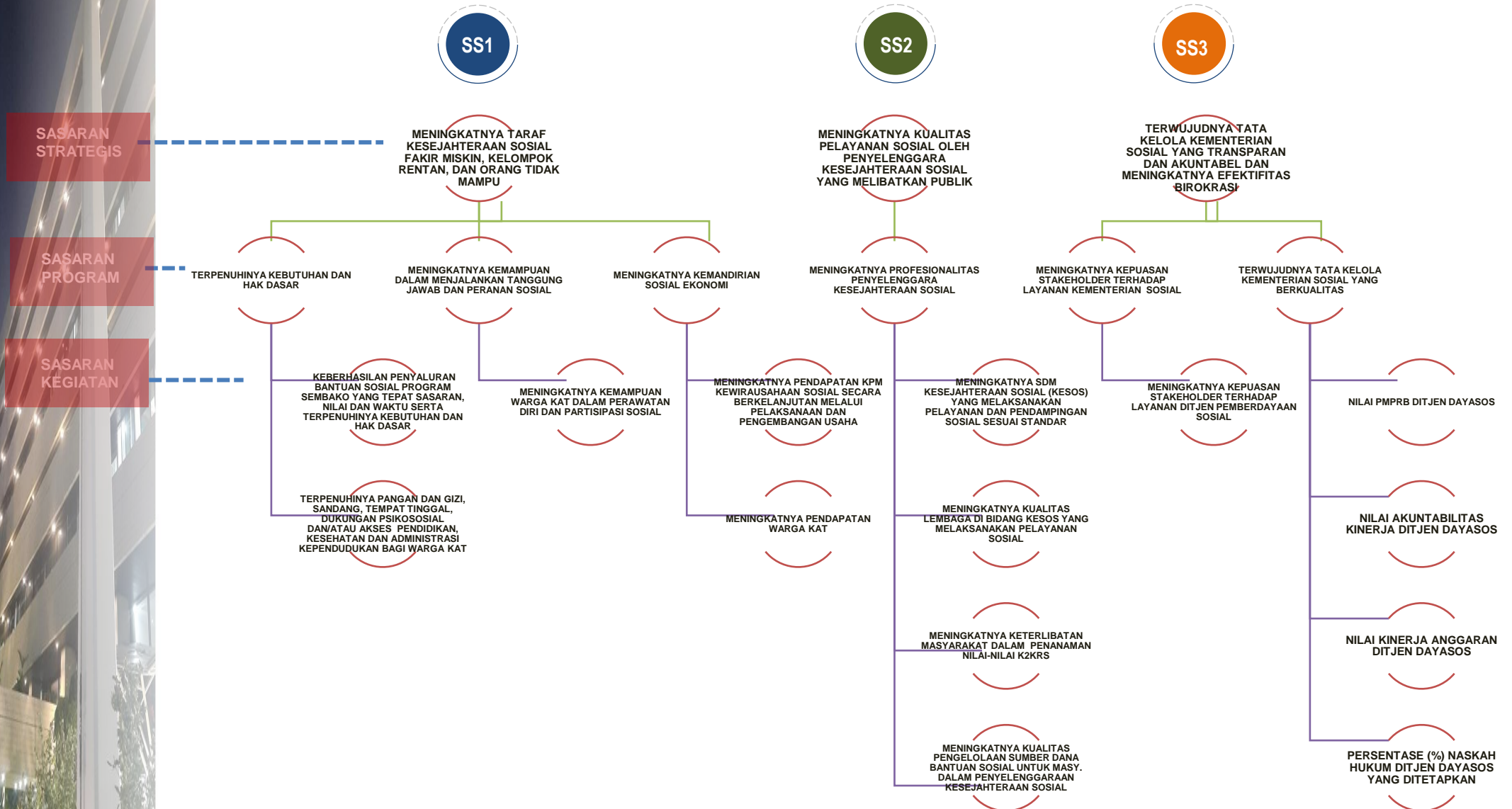
Edi Suharto

Pihak Pertama,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pemberdayaan Sosial



Beni Sujanto

# POHON KINERJA DITJEN DAYASOS




## B. RENCANA KERJA TAHUN 2022

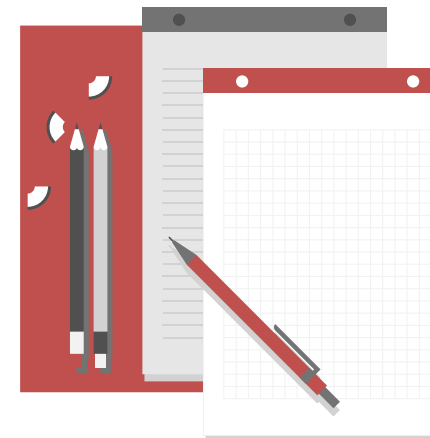
### ARAH KEBIJAKAN

 **Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022.**  
**Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial | <input checked="" type="checkbox"/> Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan umum UKE |
| <input checked="" type="checkbox"/> Meningkatnya kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik UKE 1       | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>1</sup> Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM UKE 1  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Meningkatnya kualitas layanan Legislasi dan Ligitasi UKE 1                    |  |

### ANGGARAN TAHUN 2022

 Anggaran tahun 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial telah mengalami perubahan dari alokasi awal.





## PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja pada awal Tahun 2022 mengacu pada Renstra Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2020-2024. Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial memiliki 5 Sasaran Program dengan 14 Indikator Kinerja Program dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1. Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	1. Nilai Kepuasan stakeholder terhadap layanan Sekretariat Ditjen Dayasos	90
2. Meningkatnya kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik UKE 1	1. Persentase (%) layanan komunikasi dan informasi publik pemberdayaan sosial yang optimal	100
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan umum UKE1	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Pemberdayaan Sosial	82
	2. Nilai SMART Sekretariat Pemberdayaan Sosial	87
	3. Nilai IKPA Sekretariat Pemberdayaan Sosial	87
	4. Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi Pemantauan tepat waktu	82
	5. Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100
	6. Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa	100
	7. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN	100
	8. Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan	66
	9. Jumlah Satuan Kerja yang Memenuhi Standar untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	1
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM UKE1	1. Nilai profesionalitas ASN Ditjen Pemberdayaan Sosial	88
	2. Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Pemberdayaan Sosial	81
5. Meningkatnya kualitas layanan Legislasi dan Ligitasi UKE1	1. Persentase (%) naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan	100



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA



## A. CAPAIAN KINERJA

### SASARAN PROGRAM

01

**Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial.**



#### Indikator Kinerja Program:

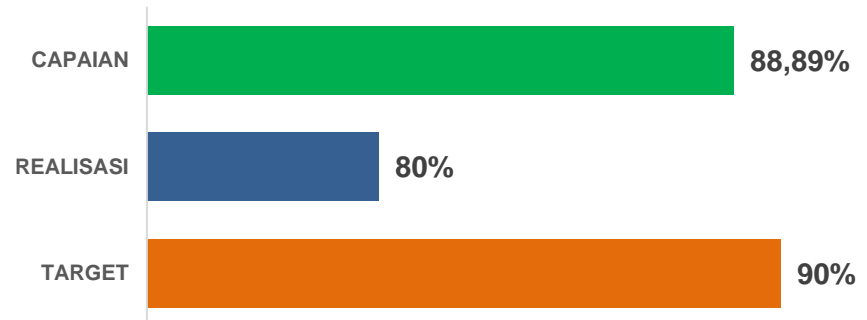
Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial

TARGET : 90%  
REALISASI : 80,49  
CAPAIAN : 88,89%

**Capaian Sasaran Program 1 sebesar : 88,89%**



## Indikator Kinerja Program 1



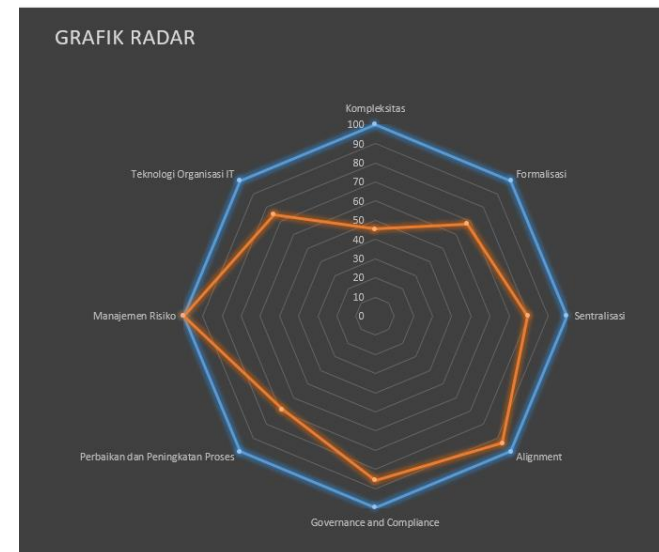
Capaian kinerja indikator 1 Tahun 2022 sebesar 100%.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, capaian kinerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial dapat diketahui dari 5 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja.

Evaluasi kelembagaan mencakup 2 dimensi pokok organisasi yaitu struktur dan proses organisasi dengan masing-masing memiliki bobot 50%. Form evaluasi kelembagaan mengacu pada Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

*"Pada tahun 2022, Nilai Profesionalitas ASN diperoleh dari hasil pengisian formulir Indeks Profesionalitas oleh Pegawai lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial pada."*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai evaluasi kelembagaan pemerintah. Bahwa dalam hal ini Sekretariat sudah melakukan evaluasi melalui kuesioner dengan hasil sebagai berikut :



Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.



## Kendala dan tantangan

Struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

## Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja

Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial melakukan Survey kepuasan layanan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan distribusi personal responden sebagai berikut :

UNSUR RESPONDEN	ORANG
Internal Kementerian Sosial	105
Kementerian/Lembaga	6
Masyarakat	464
Organisasi Non Pemerintah	16
Pemerintah Daerah	46
Pilar Sosial Kelembagaan	36
Pilar Sosial Perorangan	390
JUMLAH	1063

JENIS KELAMIN	ORANG
Laki-laki	394
Perempuan	669
JUMLAH	1063

USIA RESPONDEN	ORANG
< 30 Tahun	130
31 - 40 Tahun	711
> 50 Tahun	222
JUMLAH	1063

PENDIDIKAN	ORANG
SD	266
SMP	151
SMA	265
D1/D2/D3	42
D4/S1	305
S2	33
S3	1
JUMLAH	1063





Perhitungan Survei Kepuasan Layanan Berdasarkan Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

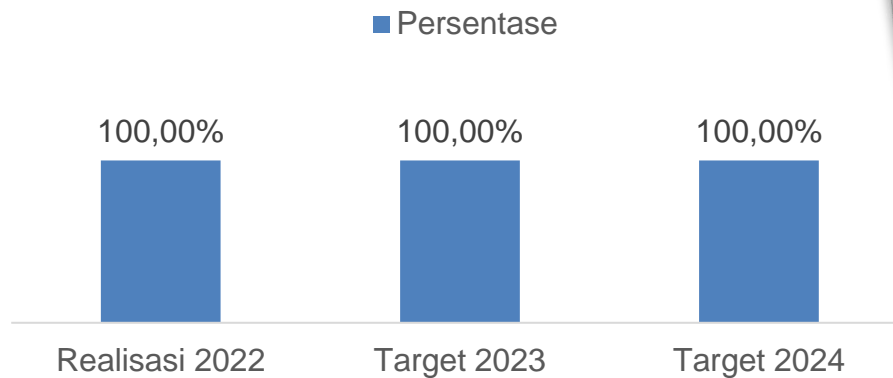
No	Program	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Predikat
<b>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL, Indeks rata-rata 79,87 (Baik)</b>				
1	Layanan BMN	3,857	96,43	Sangat Baik
2	Layanan Kearsipan	3,000	75,00	Cukup
3	Layanan Kehumasan	3,000	75,00	Cukup
4	Layanan Kesekretariatan Lainnya	2,857	71,43	Cukup
5	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,132	78,30	Baik
6	Pelayanan Hukum	3,54	88,46	Sangat Baik
7	Perbendaharaan (Pelaksanaan dan Pengelolaan)	2,979	74,48	Cukup
<b>DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK ADAT TERPENCIL &amp; KEWIRAUSAHAAN SOSIAL, Indeks rata-rata 78,46 (Baik)</b>				
8	Layanan Komunitas Adat Terpencil	3,089	77,22	Baik
9	Layanan Kewirausahaan Sosial (Pahlawan Ekonomi )	3,188	79,70	Baik
<b>DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN, Indeks rata-rata 79,78 (Baik)</b>				
10	Layanan Bansos Sembako	3,191	79,78	Baik

## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja 1 merupakan indikator baru di Sekretariat Ditjen Dayasos, belum ada pengukuran pada tahun sebelumnya sehingga capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya.

## Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 1.1 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%, artinya realisasi tahun 2022 sudah memenuhi target 2024. Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial akan mendorong terus pencapaian target jangka menengah.





## SASARAN PROGRAM

02

**Meningkatnya kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik UKE 1**

**Indikator Kinerja Program :**



Persentase (%) layanan komunikasi dan informasi publik pemberdayaan sosial yang optimal.

**TARGET : 100%**  
**REALISASI : 100%**  
**CAPAIAN : 100%**

**Rata-rata Capaian Sasaran Program 1 sebesar : 100%**

**Jumlah viewer pemberitaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.**

Viewer atas publikasi pada media adalah orang yang menonton/melihat pemberitaan yang diposting/diupload pada media pemberitaan antara lain pada laman kemsos.go.id; Instagram; Youtube; dan Twitter.



Capaian indikator kinerja program 2 Tahun 2022 sebesar 100%.

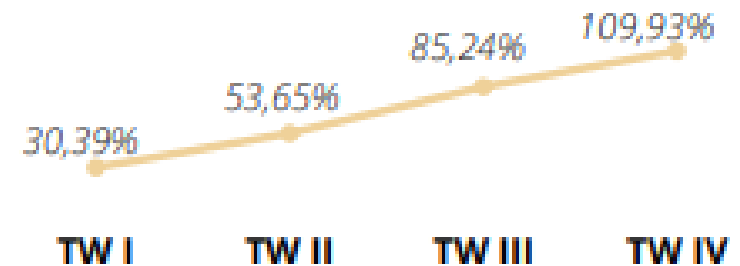
Capaian kinerja komunikasi dan informasi publik pemberdayaan sosial bisa dibilang sudah optimal ini dibuktikan dengan banyaknya informasi melalui media elektronik . Selain menyebarkan informasi melalui media internal, sekretariat Ditjen Dayasos juga menyebarkan informasi melalui Media eksternala melalui media online nasional mainstrem



### Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

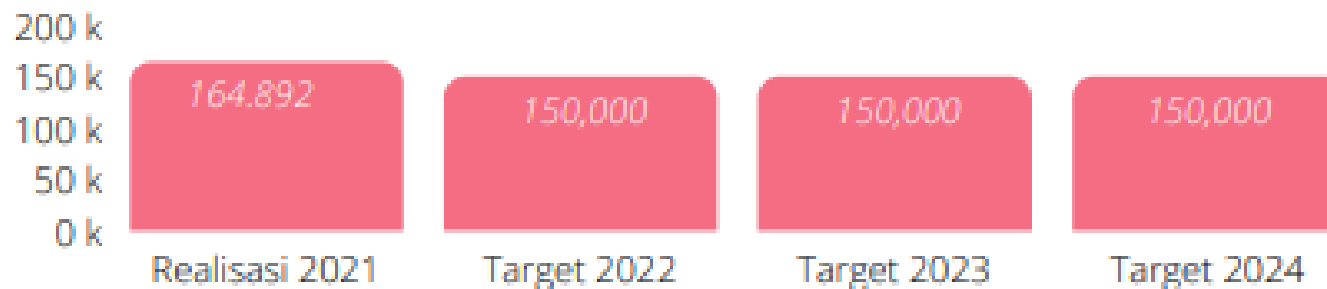
Indikator Kinerja 2 merupakan indikator baru di Sekretariat Ditjen Dayasos, sehingga capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

### Capaian Kinerja Indikator 2 meningkat setiap triwulan



### Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 2 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%. Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial harus tetap meningkatkan publikasi program pemberdayaan sosial.



## Analisis Capaian Indikator Kinerja 2

Secara umum realisasi kinerja 2 sudah tercapai dengan baik. realisasi sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 maupun target jangka menengah. Keberhasilan ini dukung dengan adanya pemberitaan program pemberdayaan sosial melalui berbagai platform yaitu **website Kemensos.go.id, Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube.**



## Analisis efisiensi penggunaan sumber daya



Pada Sub Bagian Humas didukung oleh pejabat fungsional pranata humas, PPNPN dari berbagai latar pendidikan serta pejabat administrator dalam manajemen koordinasi dan finalisasi.



HALMAHERA BARAT (28 September 2022) - Presiden RI Joko Widodo menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Bantuan PKH, BPNT dan BLT BBM di Desa Gupasa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Bertempat di Kantor Pos Gupasa, Joko Widodo menyerahkan bantuan secara simbolis. Bantuan di kelola oleh D...



## Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja 2.



Kegiatan pokok pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang mendukung Indikator Kinerja 2 adalah :

- Peliputan Kegiatan oleh Tim Kehunasan dalam berbagai pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Sosial.
- Pameran untuk memperkenalkan program-program pemberdayaan sosial dalam event besar Rangkaian Peringatan Hari Kemerdekaan dan HKSN
- Publikasi atau Informasi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya.



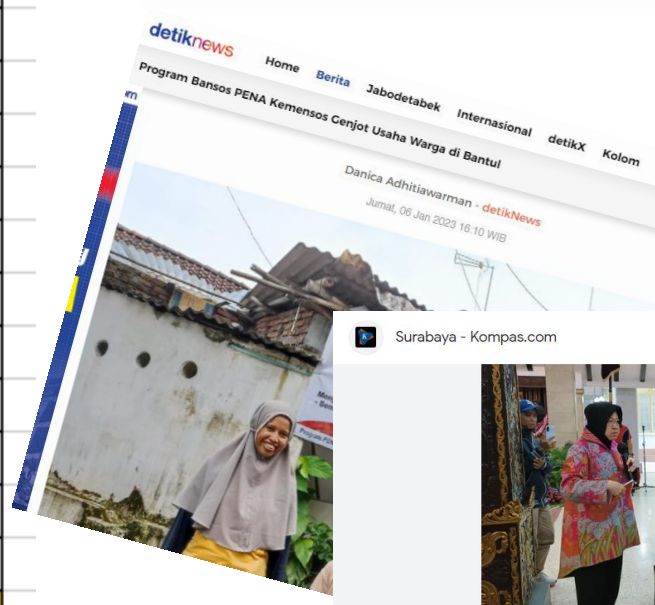
Jumlah pemberitaan terkait Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di media massa nasional.

Pemberitaan pada media massa nasional adalah pemberitaan yang dipublikasikan melalui media koran, majalah, situs media online, TV, dan Radio.

Jumlah Pemberitaan Media Nasional		
No.	Bulan	Media
1	Januari	32
2	Februari	2
3	Maret	95
4	April	13
5	Mei	0
6	Juni	56
7	Juli	23
8	Agustus	27
9	September	14
10	Oktober	14
11	November	76
12	Desember	80
TOTAL PEMEDIAAN NASIONAL		432



## Hasil Monitoring dan Evaluasi Program PENA Kemensos, Ini Penjelasan Tri Rismaharini



Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024, Kemensos Luncurkan Program Pena di Malang Halaman all - Kompas.com

Gambar bisa saja memiliki hak cipta. Pelajari Lebih Lanjut



## Jumlah pemberitaan terkait Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di media sosial

### Pemberitaan pada media sosial Ditjen Dayasos



#### Direktorat Jenderal Pemberdayaa... Follow

Posts About Videos More

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial  
8 Nov 2022 ·

SobatSosial, berdasarkan Keppres Nomor 96/TK/Tahun 2022, Presiden @jokowi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 5 tokoh.

apa saja mereka dan bagaimana kisah perjuangan

HariPahlawan2022 #PahlwankuTeladanku



4

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial  
@direktoratjenderalpemberda3510  
1.43K subscribers

HOME VIDEOS SHORTS LIVE PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS

Videos Play all



Shorts



#### Ditjen Pemberdayaan Sosial

504 Tweets

Ditjen Pemberdayaan Sosial @dayasosbisa · Jul 21, 2022  
Hai #Sobatsosial

Sebarat lagi kita akan memperingati Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati tepatnya pada tanggal 23 Juli. Dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini, yuk kita tanamkan kembali kepada seluruh anak di Indonesia tentang nilai-nilai kepahlawanan.



1

Show this thread

Ditjen Pemberdayaan Sosial @dayasosbisa · Jul 20, 2022  
Dampaknya peningkatan produksi dimana masing-masing tunnel akan mampu memproduksi 200 kilogram garam dan dapat dipanen sebanyak 5-6 kali dalam sebulan.

1



## SASARAN PROGRAM

03

**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum UKE 1.**

**Indikator Kinerja Program:**

Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat  
Pemberdayaan Sosial

TARGET : 82  
REALISASI : 77.51  
CAPAIAN : 93%

Nilai SMART Sekretariat  
Pemberdayaan Sosial

TARGET : 87  
REALISASI : 97,77  
CAPAIAN : 112%



## Indikator Kinerja

Nilai IKPA Sekretariat Pemberdayaan Sosial

TARGET : 87  
REALISASI : 91,50  
CAPAIAN : 105%

Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi Pemantauan tepat waktu

TARGET : 82  
REALISASI : 100  
CAPAIAN : 100%

Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti

TARGET : 100  
REALISASI : 100  
CAPAIAN : 100 %

Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa

TARGET : 100  
REALISASI : 0%  
CAPAIAN : 0%

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN

TARGET : 100  
REALISASI : 100  
CAPAIAN : 100 %

Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan

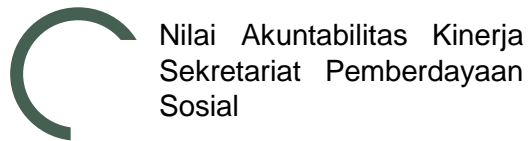
TARGET : 66  
REALISASI : 57,90  
CAPAIAN : 87,7 %

Jumlah Satuan Kerja yang Memenuhi Standar untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM

TARGET : 1  
REALISASI : 0  
CAPAIAN : 0%

**Rata-rata Capaian Sasaran Program sebesar : 87,67%**

## Indikator Kinerja Program 3.1



Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Nilai SAKIP adalah nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Unsur-unsur penilaiannya meliputi: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%) dan Pencapaian Kinerja (20%). Hasil penilaian SAKIP menunjukkan sejauh mana implementasi SAKIP sudah dilaksanakan oleh instansi baik dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi hingga pencapaian kinerja.



Capaian indikator kinerja program 3.1 Tahun 2022 sebesar 93,33%.

Uunsur penyumbang terbesar nilai SAKIP Sekretariat Ditjen Dayasos 2022 adalah unsur perencanaan, pengukuran kinerja, dan pencapaian kinerja. Perencanaan meliputi rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. Pengukuran kinerja meliputi pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran. Sedangkan pencapaian kinerja meliputi output dan outcome yang dilaporkan.

Nilai yang diperoleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah 77,89 (kategori BB) dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.



## Nilai SAKIP per Unsur Penilaian

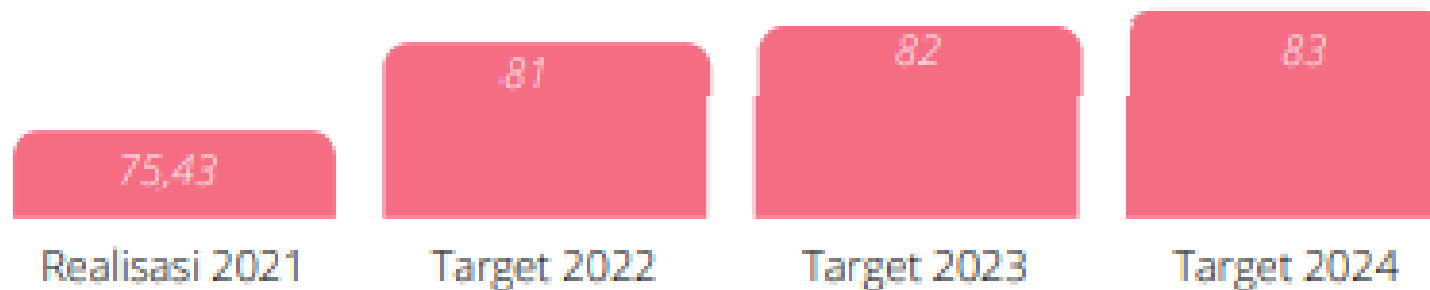
Unsur penyumbang terbesar nilai SAKIP Sekretariat Ditjen Dayasos 2022 adalah unsur perencanaan, pengukuran kinerja, dan pencapaian kinerja.

Perencanaan meliputi rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. Pengukuran kinerja meliputi pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran. Sedangkan pencapaian kinerja meliputi output dan outcome yang dilaporkan.



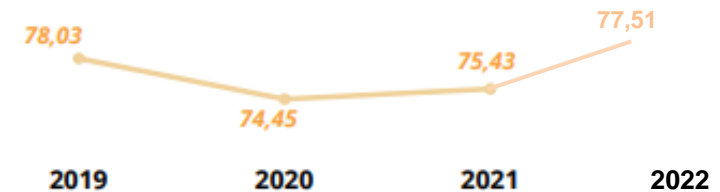
## Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 3.1 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90,88 %. Masih perlu peningkatan sebesar 7.57 poin.



## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja 3.1 merupakan indikator baru pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial sehingga capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Nilai SAKIP Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.



## Analisis Efisiensi Sumber Daya

- ✓ Dalam penyusunan Laporan Kinerja didukung oleh pejabat fungsional perencanaan dan pejabat administrator
- ✓ Dalam rangka mempermudah pengumpulan Data lingkup Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial menggunakan Gdrive yang mudah diakses oleh pegawai,

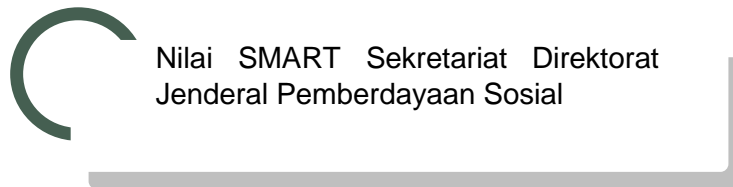
## Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja 3.1

Kegiatan pokok pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang mendukung Indikator Kinerja 3.1 adalah

1. Asistensi Perencanaan Program
2. Tim Perencana Program dan Pelaporan Ditjen Pemberdayaan Sosial
3. Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Sosial
4. FGD Restrukturisasi Program dan Anggaran Kementerian Sosial TA 2022 Pasca Perpress No. 110 Tahun 2021 Bidang Pemberdayaan Sosia
5. Koordinasi Program dan Anggaran dengan Instansi Terkait
6. Pembahasan Penyerapan Anggaran dan Rencana Kerja Triwulan IV lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial TA 2022
7. Penyusunan RKAKL Lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial SOTK Baru 2022 dan TA 2023
8. Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi
9. Koordinasi dan Konsultasi Monev Pelaksanaan Program
10. Kajian Cepat program PENA

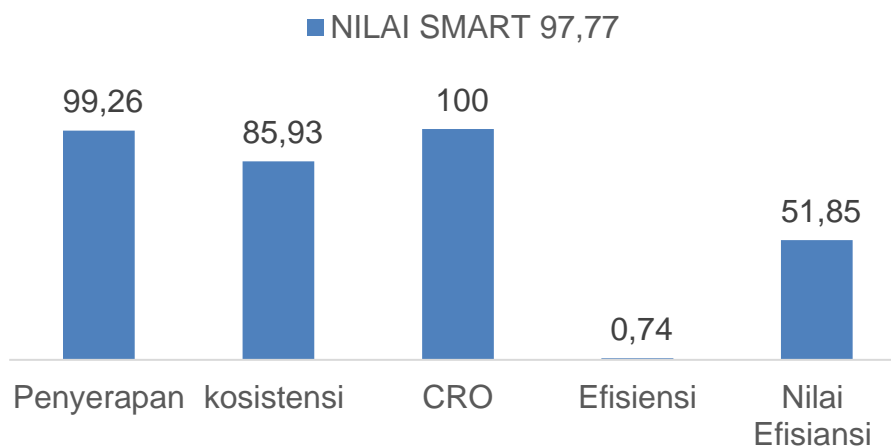


## Indikator Kinerja Program 3.2



Nilai SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) adalah Nilai untuk Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang meliputi 3 (tiga) Aspek pengukuran yaitu Aspek Manfaat, Aspek Implementasi dan Aspek Konteks yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Capaian kinerja indikator 3.2 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 0,72 Poin. Nilai SMART Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial masuk dalam kategori Baik.



Capaian indikator kinerja program 3.1 Tahun 2022 sebesar 112%.



Capaian Triwulanan Capaian Kinerja Indikator 3.2 meningkat dari semester I.



Pada Semester I, Nilai SMART masih rendah karena nilai penyerapan masih cukup rendah diakibatkan adanya beberapa kegiatan yang ditunda terkendala perubahan kebijakan pada pelaksanaan kegiatan.



### Analisis Capaian Indikator Kinerja 3.2

Secara umum, capaian kinerja Indikator 3.2 telah melebihi target yang ditetapkan. Nilai SMART Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial juga lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Indikator yang mendukung capaian kinerja yaitu penyerapan anggaran 99,26%; konsistensi 85,93%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir realisasi RPJM pada IK 3.2 masih terdapat selisih. Sekretariat akan terus meningkatkan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program untuk meningkatkan capaian kinerja 3.2 dan Capaian Rincian Output yang belum mencapai 100%

### Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dalam rangka monitoring dan evaluasi program pemberdayaan sosial didukung oleh pejabat fungsional perencana, pengelola evaluasi dan laporan dan pejabat administrator. Pelaporan Kinerja secara online dilaksanakan per Triwulan.

### Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja 3.2

1. Penyusunan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi
2. Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi
3. Koordinasi dan konsultasi monev pelaksanaan program
4. pengelolaan hasil pemantauan dan evaluasi





### Indikator Kinerja Program 3.3

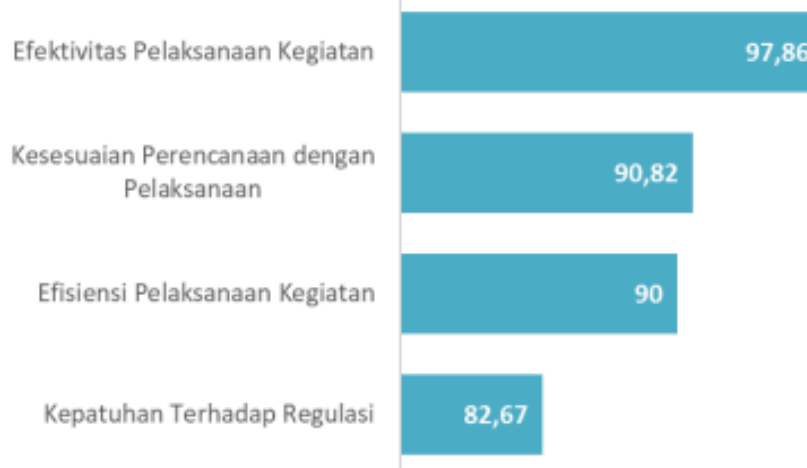


#### Nilai IKPA Sekretariat Pemberdayaan Sosial



Nilai IKPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. IKPA adalah indikator yang ditetapkan kemenkeu untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga. Nilai IKPA meliputi 4 Aspek dan 13 Indikator. Aspek yang menjadi pengukuran IKPA yaitu Kesesuaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Efektifitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran dan Kepatuhan terhadap regulasi.

#### Rincian Nilai IKPA per Aspek



### Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial mengalami peningkatan dari 2 tahun sebelumnya. Penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pengaruh dari perubahan tata cara kerja yang sebelumnya bekerja diruangan kantor menjadi terjadwal kerja dirumah.



### Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 3.2 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 101,99% atau telah mencapai target. Namun tetap perlu menjaga konsistensi agar nilai IKPA terus mengalami kenaikan.

### Analisis Capaian Indikator Kinerja 3.3

Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial telah mencapai target yang ditetapkan dan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingginya nilai IKPA diantaranya karena dokumen SPJ yang akuntabel, tertib laporan keuangan, terkelolanya UP dan TUP dengan baik, Renkas tepat waktu, SPM yang akuntabel, hanya sebagian kecil SP2D yang retur.

### Analisis Efisiensi Sumber Daya

- SDM yang mendukung indikator Kinerja 3.3 terdiri dari berbagai latar belakang.
- Koordinasi antar bagian dilaksanakan secara offline maupun online untuk lebih efektif dan efisien.

### Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja 3.2

Kegiatan pokok pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang mendukung Indikator Kinerja 3.3 adalah :



## Indikator Kinerja Program 3.4



**Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi Pemantauan tepat waktu**

Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu adalah satuan yang mengisi aplikasi e monev Bappenas dan atau e kinerja Kemensos sebelum batas waktu pelaporan.

**FORMULASI**  $\frac{n}{T} \times 100\%$

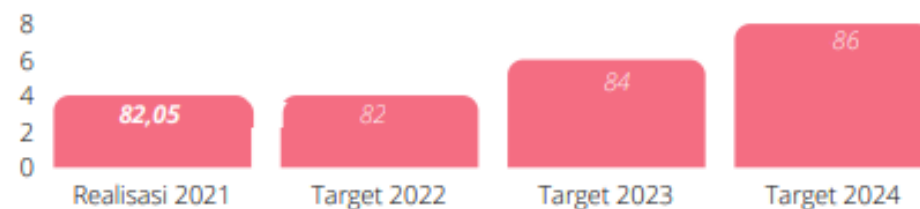
n : Jumlah Satker yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu  
T : Total Jumlah Satker

Perbandingan realisasi dan target Capaian kinerja indikator 3.4 Tahun 2022 sebesar 121,95 %. Dari 39 Satker, 32 Satker telah lengkap mengisi aplikasi e-Monev tepat waktu. Batas Waktu Pengisian pada 31 Januari 2023.

## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja 3.4 merupakan indikator baru di Sekretariat Ditjen Dayasos, belum ada pengukuran pada tahun sebelumnya sehingga Capaian kinerja belum dapat dibandingkan

Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah Realisasi indikator kinerja 3.4 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 95,41 %. Sekretariat akan terus meningkatkan koordinasi pelaporan melalui aplikasi.





### Analisis Capaian Indikator Kinerja 3.4

Analisis Capaian Indikator Kinerja 3.4 Target persentase(%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan telah memenuhi target. Terdapat beberapa Satker yang belum melengkapi pengisian secara online melalui aplikasi e-Monev sampai batas pengisian 31 Januari 2022. Dalam rangka meningkatkan partisipasi Satker dalam mengisi aplikasi pemantauan, Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial berkoordinasi dengan aplikator pelaporan daerah melalui Grup WA dan membantu pengisian apabila terdapat kendala dalam pengisiannya.

### Analisis Efisiensi Sumber Daya

- Untuk mempermudah pelaporan melalui aplikasi masing-masing Satker menunjuk seorang aplikator Pelaporan
- Untuk mempermudah koordinasi, Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial memiliki Grup WA dengan seluruh Aplikator Pelaporan masing-masing Satker

### Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja 3.4

Kegiatan pokok pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang mendukung Indikator Kinerja 3.4 adalah Pelaksanaan Pendampingan dan Koordinasi Pelaporan Online Aplikasi SmArt, eMonev dan eKinerja untuk meningkatkan kepatuhan dan ketepatan waktu penyampaian laporan



## Indikator Kinerja Program 3.5



**Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti**

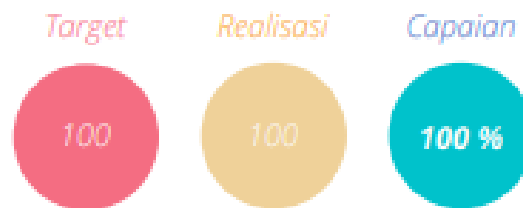


Temuan yang dimaksud adalah temuan pengawas internal dan eksternal. Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti adalah respon yang segera dilakukan terhadap notisi temuan pemeriksa.

**FORMULASI**  $\frac{n}{T} \times 100\%$

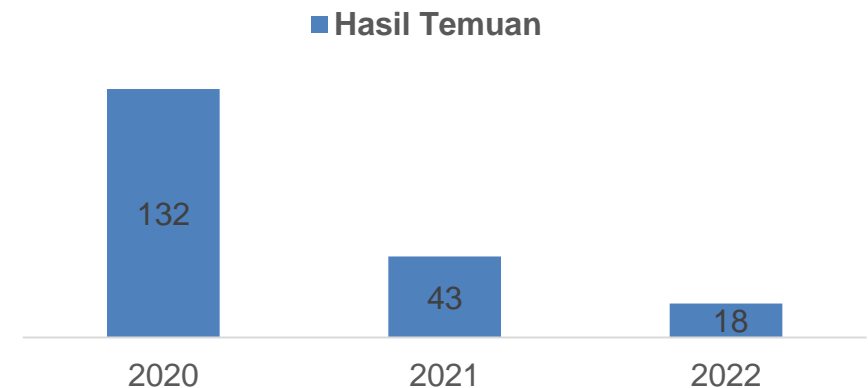
n : Jumlah Satker yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu  
T : Total Jumlah Satker

Perbandingan realisasi dan target Capaian kinerja indikator 3.5 sebesar 100 %. Sebanyak 18 temuan selama tahun 2022, seluruhnya telah ditindaklanjuti.



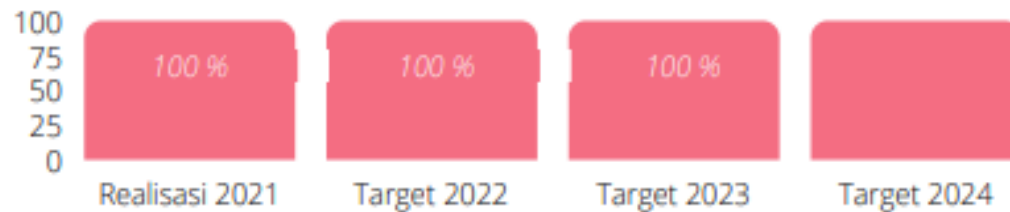
## Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja 3.5 merupakan indikator baru di Sekretariat Ditjen Dayasos, belum ada pengukuran pada tahun sebelumnya sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk Jumlah temuan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.



## Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 3,5 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%. Setditjen Dayasos harus tetap konsisten dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan baik internal maupun eksternal.



## Analisis Capaian Indikator Kinerja 3.5

Secara Umum capaian kinerja 3.5 telah mencapai target yang ditetapkan. Seluruh temuan telah ditindaklanjuti. Hal ini didukung dengan adanya Tim Percepatan Penyelesaian TLHP.



## Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sekretariat Ditjen Pemberdayaam Sosial berkomitmen dalam rangka percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), hal tersebut diwujudkan dengan adanya surat perintah tugas dari sekretaris Ditjen Pemberdayaan sosial Percepatan Penyelesaian TLHP

## Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja 3.5

Kegiatan pokok pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang mendukung Indikator Kinerja 3.5 adalah

- Rekonsiliasi laporan keuangan semester I dan II pusat tahun 2022
- pendampingan dan percepatan TLHP lingkup ditjen Dayasos
- Rapat konsolidasi TLHP lingkup Ditjen



Kegiatan rekonsiliasi TLHP dan kegiatan percepatan TLHP di daerah



## Indikator Kinerja Program 3.6



**Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa.**



Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan: tingkat kepatuhan Rencana umum pengadaan yang diunggah kedalam aplikasi SIRUP, Pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE, Laporan penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa dan Kesesuaian tahap pelaksanaan.

Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan: tingkat kepatuhan

- Rencana umum pengadaan telah diunggah kedalam aplikasi SIRUP (20%)
- Pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- Laporan penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa (20%)
- Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

### FORMULASI

$$(20\% \times a) + (30\% \times b) + (20\% \times c) + (30\% \times d)$$

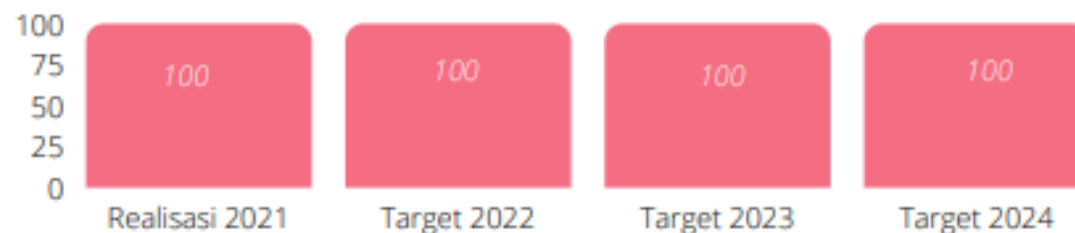
- a : Jumlah paket pengadaan >200 juta yang diunggah ke aplikasi SIRUP dibagi jumlah paket >200 juta dalam rencana pengadaan
- b : Jumlah pengadaan belanja modal >200 juta yg dilaksanakan melalui SPSE dibagi rencana pengadaan belanja modal >200 juta
- c : Jumlah pengadaan >200 juta yang dibuat laporannya dibagi jumlah total pengadaan >200 juta
- d : Jumlah pengadaan >200 juta yang sesuai dengan tahap pelaksanaan sesuai aturan dibagi total rencana pengadaan

### Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja 3.6 merupakan indikator baru di Sekretariat Ditjen Dayasos, belum ada pengukuran pada tahun sebelumnya sehingga tidak ada perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

### Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 3.6 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%.





### Analisis Capaian Indikator Kinerja 3.6

Tidak ada pengadaan belanja modal lebih dari 200 juta yang dilaksanakan melalui SPSE

### Analisis Efisiensi Sumber Daya

SDM yang mendukung Indikator Kinerja 3.6 terdiri dari dari berbagai bidang. Koordinasi dilaksanakan secara offline maupun online untuk lebih efektif dan efisien.

### Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja 3.6

Kegiatan pokok pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang mendukung Indikator Kinerja 3.6 adalah

- Diklat sertifikasi PBJ untuk meningkatkan kapasitas SDM





### Indikator Kinerja Program 3.7



**Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN**



### FORMULASI

$$(30\% \times a) + (25\% \times b) + (25\% \times c) + (20\% \times d)$$

a : Jumlah RKBMN yang direalisasikan dibagi jumlah RKBMN

b : SK penetapan status penggunaan BMN dibagi usulan penetapan status penggunaan BMN

c : Jumlah SIP dibagi jumlah BMN yang diadakan di tahun bersangkutan

d : Laporan BMN yang disusun dibagi jumlah laporan yang harus disusun

Tingkat kepatuhan pengelola BMN diukur berdasarkan Realisasi rencana kebutuhan BMN, SK penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 ke pengguna barang (<100 juta), Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun bersangkutan didukung Surat Izin Pemakaian dan Pelaporan BMN (semesteran dan tahunan)

Tingkat kepatuhan pengelola BMN diukur berdasarkan berikut:

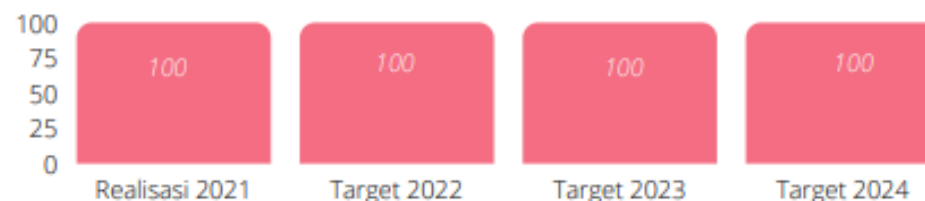
1. Realisasi rencana kebutuhan BMN (RKBMN) bobot 30%
2. Tersedianya SK penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 ke pengguna barang (<100 juta) bobot 25%
3. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun bersangkutan didukung Surat Izin Pemakaian bobot 25%
4. Pelaporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)

### Perbandingan realisasi dan target Capaian

kinerja indikator 2.2 Tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi dari target yang ditetapkan



### Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah



## Analisis Capaian Indikator Kinerja 3.7

- Ada RKBMN pada 2022 yang disusun untuk diajukan di tahun 2024
- Terdapat 34 SIP
- Terdapat 3 Laporan BMN yang di susun pada tahun 2022

## Analisis Efisiensi Sumber Daya

SDM yang mendukung Indikator Kinerja 3.7 terdiri dari berbagai latar belakang. Koordinasi antar petugas BMN masing-masing satker dilakukan secara online.

## Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja 3.7

Kegiatan pokok pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang mendukung Indikator Kinerja 3.7 adalah

- Penyusunan Laporan BMN Semester dan Tahun 2020 (melibatkan satker pusat, dekon, TP) Laporan tahunan, semester 1, Triwulan 3, bulanan (agustus, sept, okt, nov, des)



### Indikator Kinerja Program 3.8



Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan adalah nilai yang dikeluarkan oleh Biro Umum dengan unsur-unsur penilaian terkait Klasifikasi arsip, Tata naskah dinas, Jadwal retensi dan Keamanan dan akses arsip.

*"Pada tahun 2022, Nilai Evaluasi pengawasan internal kearsipan diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dalam dua aspek yaitu aspek internal dan eksternal"*

### Perbandingan realisasi dan target Capaian kinerja

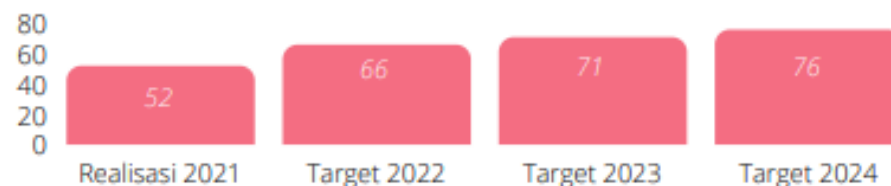
Indikator 3.8 sebesar 68,22 %. Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 termasuk dalam kategori B (Baik) dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2022	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	75,10	60%	45,06
Internal	57,90	40%	23,16
Nilai Akumulasi			<b>68,22</b>



### Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 3.8 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 68,4%. Perlu peningkatan dari realisasi tahun ini.





### Analisis Capaian Indikator Kinerja 3.8



Berdasarkan grafik radar diatas, sub aspek tertinggi yang mendekati nilai standar adalah subaspek "Penciptaan Arsip" sedangkan, sub aspek yang memiliki nilai paling rendah adalah sub aspek "Penyusutan Arsip" dan "SDM Kearsipan". Beberapa hal yang menyebabkan nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan masuk dalam kategori baik adalah :

1. Penetapan dan sosialisasi terhadap sebagian besar kebijakan kearsipan di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
2. Pembinaan kearsipan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis kearsipan di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
3. Pengendalian naskah dinas dilaksanakan sesuai ketentuan;
4. Pengelolaan dan pengendalian arsip inaktif yang berasal dari seluruh Unit Pengolah di lingkungan Kesekretariatan;
5. Penyusutan arsip melalui kegiatan pemindahan arsip inaktif dan pemusnahan arsip telah dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undang kearsipan yang berlaku;
6. Pemenuhan kompetensi bagi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan; dan
7. Penyediaan sebagian besar prasarana dan sarana kearsipan.

## Analisis Capaian Indikator Kinerja 3.8

Berdasarkan surat nomor B-AK.01.00/4915/2022 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 dari ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA perlu adanya Kinerja yang harus ditingkatkan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dan penetapan rancangan kebijakan kearsipan meliputi JRA, program arsip vital, pengelolaan arsip terjaga, dan alih media arsip;
2. Pembinaan kearsipan secara lebih intensif terutama dalam hal pengawasan kearsipan internal, pengelolaan arsip vital, pemberian penghargaan kearsipan, pengelolaan arsip terjaga sampai dengan pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga serta penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
3. Penyimpanan arsip inaktif sesuai bentuk dan media;
4. Penyerahan arsip statis yang mewakili seluruh fungsi lembaga ke Arsip Nasional Republik Indonesia secara sistemik dan simultan;
5. Penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 dan arsip penanganan COVID-19;
6. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai Simpul Jaringan melalui penyediaan sumber daya yang memadai dan partisipasi aktif dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
7. Pemanfaatan arsip melalui kegiatan pembuatan infografis, pelayanan penggunaan arsip inaktif, pameran kearsipan dan penyediaan konten bagi PPID;
8. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kearsipan;
9. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan;
10. Penetapan dan penerapan training need analysis SDM kearsipan di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
11. Penyediaan prasarana dan sarana kearsipan yang belum dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. Perencanaan dan alokasi pendanaan kegiatan kearsipan secara kontiniu.



### KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-AK.01.00/4915/2022 Jakarta, 13 Desember 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : Dua Lembar dan Satu Eksemplar  
Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022

Yth. Menteri Sosial Republik Indonesia  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki tugas melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pelaksanaan pengawasan kearsipan Tahun 2022 meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40% sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

Hasil Pengawasan kearsipan eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2022 pada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 421 Tahun 2022 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 adalah sebesar **68,22 (enam puluh delapan koma dua dua)** dengan kategori **"B (Baik)"** dengan rincian sebagai berikut:

Untuk meningkatkan pengawasan internal kearsipan, Sekretariat Ditjen Pemberdayaan mendorong penggunaan SIKD, diantaranya untuk menyeragamkan format tata naskah dinas. Sosialisasi penggunaan SIKD telah dilaksanakan pada bulan September 2021.

### Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Dalam pengelolaan kearsipan, Setditjen Dayasos didukung oleh 2 orang arsiparis mahir dan 1 orang pengadministrasi umum serta Kasubag Tata Usaha,
2. Persuratan di lingkup Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial menggunakan SIKD sehingga menhemat waktu dan kertas.

### Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja 3.8

Kegiatan pokok pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang mendukung Indikator Kinerja 3.8 adalah

1. Sosialisasi Tata naskah dinas lingkup ditjen dayasos
2. Pemantapan pengelola kearsipan lingkup ditjen dayasos
3. Pemberkasan arsip aktif ditjen dayasos
4. penataan Arsip in-aktif ditjen dayasos





## Kegiatan Kearsipan Ditjen Dayasos tahun 2022



### Indikator Kinerja Program 3.9



**Jumlah Satuan Kerja yang Memenuhi Standar untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM**



Satuan Kerja yang Memenuhi Standar untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM untuk tahun 2022 tidak ada satuan kerja yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial dikarenakan :

- Selama Tahun 2022 terjadi restrukturisasi organisasi khususnya di Ditjen Pemberdayaan Sosial sehingga ada peralihan tugas pokok dan fungsi serta perpindahan Program / Kegiatan lintas Direktorat yang cukup massif. Dengan dinamika dimaksud proses assessment / penilaian Satker yang dapat diusulkan mendapatkan Predikat WBK / WBBM menjadi terhambat.





## SASARAN PROGRAM

04

Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM UKE1



### Indikator Kinerja Program :



Nilai profesionalitas ASN Ditjen Pemberdayaan Sosial

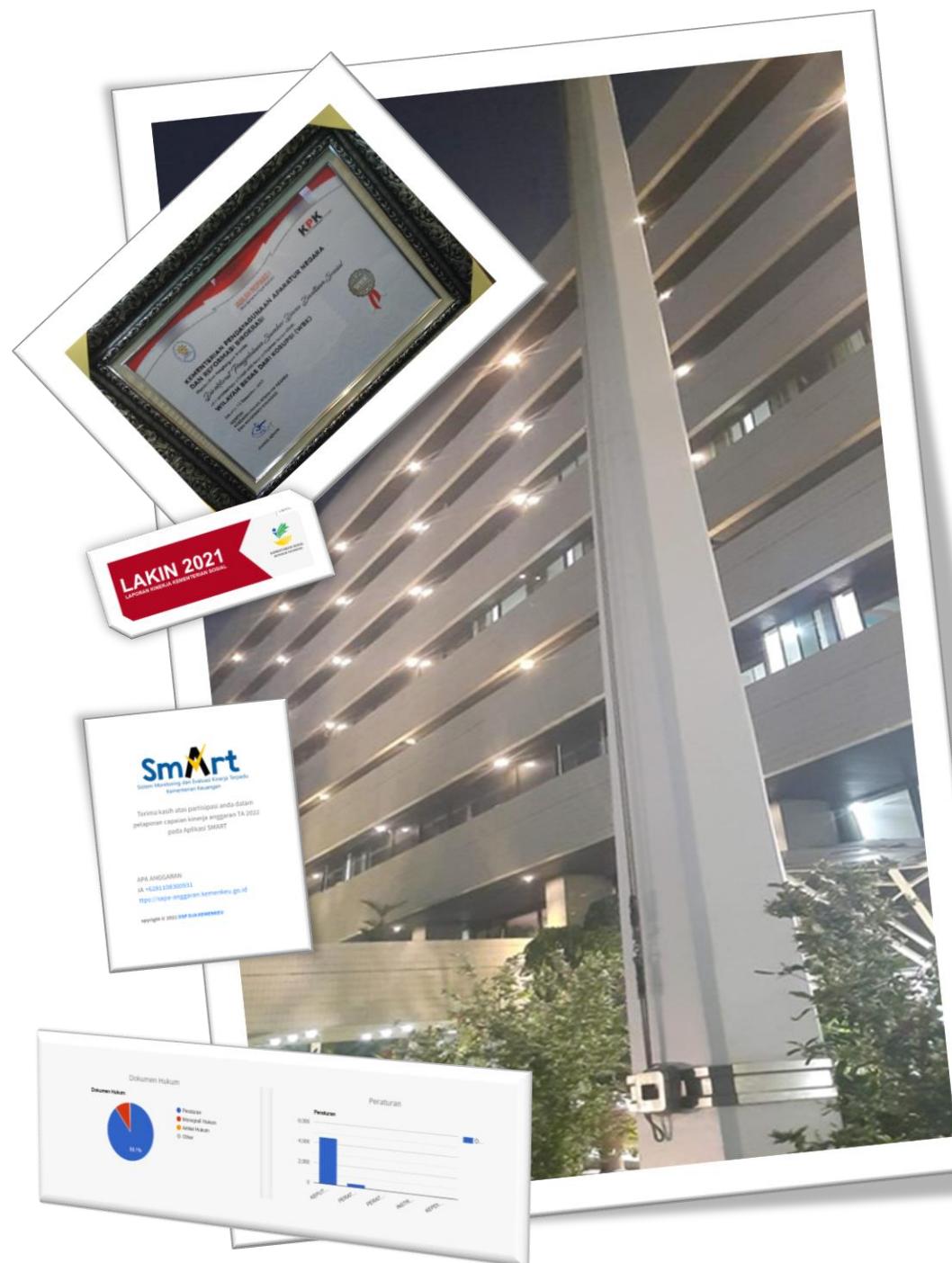
TARGET : 88  
REALISASI : 88  
CAPAIAN : 100%



Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Pemberdayaan Sosial

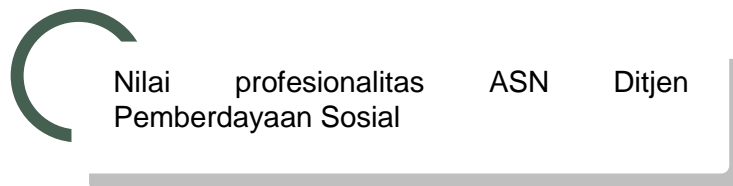
TARGET : 81  
REALISASI : 0  
CAPAIAN : 0

Rata-rata Capaian Sasaran Program 4 sebesar : 100%





## Indikator Kinerja Program 4.1



Sesuai dengan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, profesionalitas ASN diukur menggunakan 4 dimensi yaitu dimensi kualifikasi (25%), kompetensi(40%), kinerja(30%) dan kedisiplinan(5%)

" Pada tahun 2022, Nilai Profesionalitas ASN diperoleh dari hasil pengisian formulir Indeks Profesionalitas oleh Pegawai lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial pada .

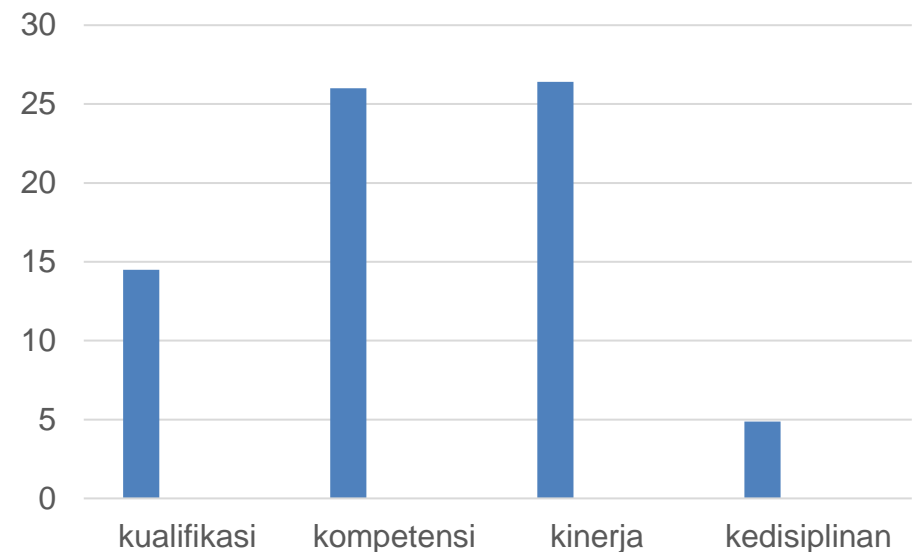
### Perbandingan realisasi dan target

Capaian kinerja indikator 1.1 Tahun 2022 sebesar 79,01 %. Nilai Profesionalitas ASN 57.45.



### Nilai per Dimensi

#### Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian



## Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pada Sub Bagian Kepegawaian didukung oleh 2 orang Pengelola Administrasi Kepegawaian untuk mengelola administrasi kepegawaian dan pejabat administrator yang berperan dalam manajemen koordinasi dan finalisasi. Pegawai dalam mengikuti diklat/ workshop/ seminar sebagian besar dilaksanakan secara virtual.

## Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja 4.1

Kegiatan pokok pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang mendukung Indikator Kinerja 4.1 adalah

1. Penataan SDM ASN
2. Rapat teknis kepegawaian lingkup Dayasos
3. Pendataan pegawai non ASN lingkup Ditjen Dayasos
4. Penilaian mandiri implementasi SPIP
5. Strategi transformasi SDM Kessos dalam program pemberdayaan tahun 2023
6. Pelatihan Pengembangan SDM



## Analisis Capaian Indikator Kinerja 4.1

Nilai Profesionalitas ASN Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi tahun 2022 57.45 atau 65,28% jika dibandingkan target yaitu 88. Salah satu penyebab Nilai Profesionalitas ASN tidak mencapai target adalah masih rendahnya nilai pada dimensi Kompetensi. Dimensi Kompetensi mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Indikatornya yaitu diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/ workshop. Rendahnya nilai dimensi Kompetensi pada Pegawai Ditjen Pemberdayaan Sosial dikarenakan masih sedikitnya pegawai yang mengikuti diklat teknis sesuai jabatannya. Selain itu, terdapat penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional di tahun 2022 sehingga pelaksanaan diklat teknis sesuai jabatan yang baru belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini menjadi pendorong Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial untuk terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawai.

NO	SATKER	TOTAL	SKORS RATA - RATA KOMPONEN							SKOR
			PENDIDIKAN	SKP	DIKLAT KEPEMIMPINAN	DIKLAT FUNGSIONAL	DIKLAT TEKNIS	WORKSHOP	DISIPLIN	
	Jumlah Keseluruhan	153	24.66	38.65	4.54	3.28	11.99	2.33	7.47	92.9
A	KANTOR PUSAT	153	3.29	5.15	0.6	0.44	1.6	0.31	1	12.39
5	DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL	153	16.44	25.76	3.02	2.18	7.99	1.55	4.98	61.93
	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	1	25	30	15	0	15	0	5	90
	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	30	14.5	26	1	1	7.25	2.83	4.87	57.45
	Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial	27	17.59	26.11	0.56	5.56	9.17	2.96	5	66.94
	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	28	16.61	21.46	0.54	3.75	6.96	1.79	5	56.11
	Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan	21	16.19	24.05	0.71	2.14	6.79	1.31	5	56.19
	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	46	8.76	26.96	0.33	0.65	2.77	0.43	5	44.9



## Indikator Kinerja Program 4.2



### Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Pemberdayaan Sosial

Realisasi indikator kinerja 4.2 sudah memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2021. Adanya nilai subdimensi Kompleksitas serta Perbaikan dan Peningkatan Proses diantara subdimensi lainnya.



## SASARAN PROGRAM

05

**Meningkatnya kualitas layanan  
Legislasi dan Ligitasi UKE1 (%)  
naskah hukum**



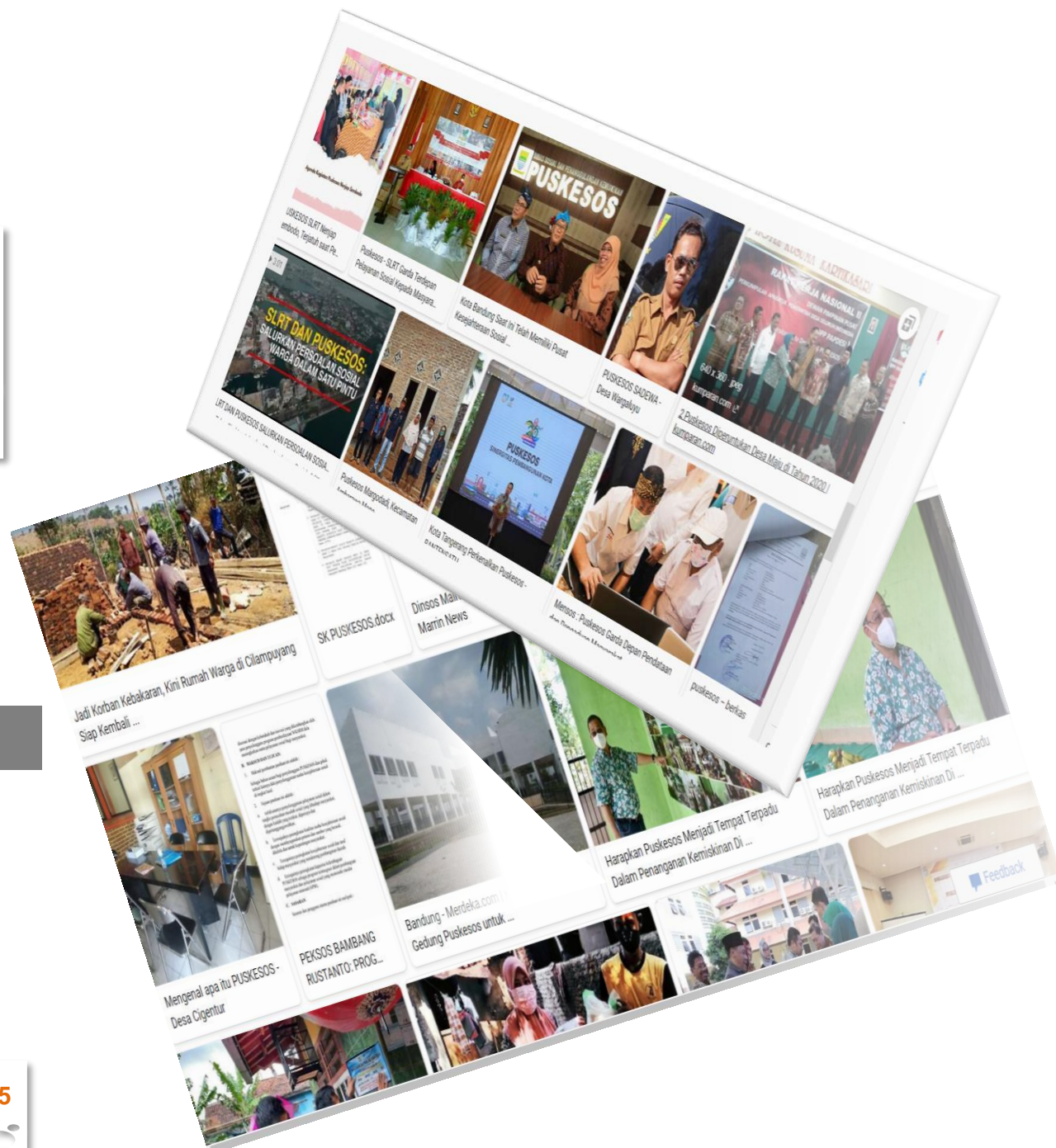
**Indikator Kinerja Program :**



Persentase (%) naskah hukum Ditjen  
Pemberdayaan Sosial yang  
ditetapkan

TARGET : 100  
REALISASI : 1194  
CAPAIAN : 100%

**Rata-rata Capaian Sasaran Program 5  
sebesar : 100%**



## Indikator Kinerja Program 5



Persentase (%) daerah yang menangani aduan/ keluhan sesuai standar

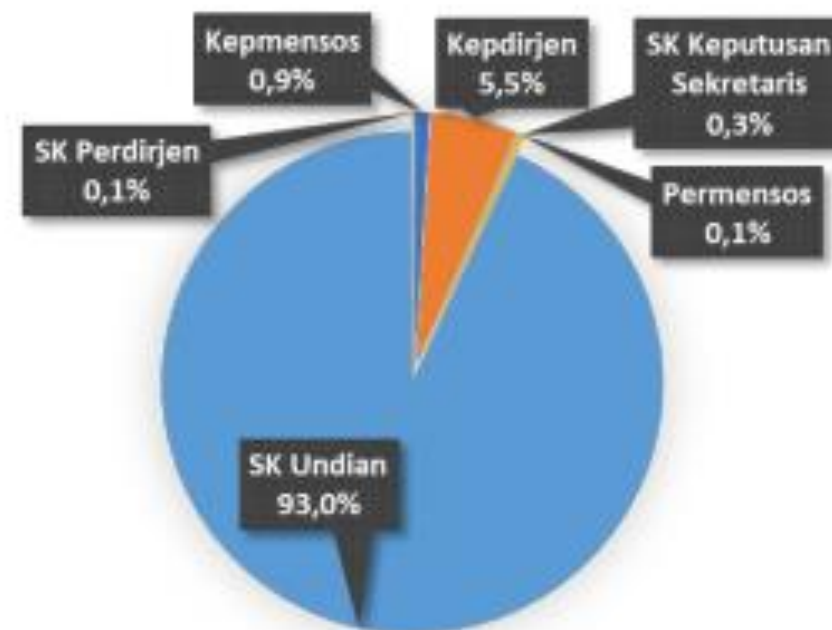
Naskah hukum yang dimaksud adalah naskah hukum yang menjadi kewenangan UKE I, ditetapkan oleh masing-masing pimpinan UKE I (hanya yang ditandatangani oleh pimpinan UKE I)

### Perbandingan realisasi dan target

Capaian kinerja indikator 5 Tahun 2022 sebesar 100 %. Selama tahun 2022 terdapat 1.194 Peraturan yang telah ditetapkan.

**FORMULASI**  $\frac{n}{T} \times 100\%$

n : Jumlah naskah hukum yang ditetapkan  
T : Total naskah hukum yang direncanakan





## Persentase Naskah per jenis naskah

Naskah hukum terbanyak yang disahkan tahun 2022 adalah Surat Keputusan Undian sebanyak 92,9%. Naskah hukum terendah adalah Permensos. Pada tahun 2021 terdapat 2 permensos yang disahkan yaitu Permensos terkait Pengumpulan Uang/ Barang dan Permensos terkait Undian Gratis Berhadiah.

### Daftar Naskah Hukum selama tahun 2022

Jenis Naskah	Jumlah
Rancangan Peraturan Menteri Sosial	3 Rancangan
Keputusan Menteri Sosial	1080 SK
Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	80 SK
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	19 SK
Perjanjian Kerja Sama	12 PKS
Total Naskah	1194

## Analisis Capaian Indikator Kinerja 5

Realisasi kinerja 5 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini di dukung dengan adanya penyusunan naskah hukum lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial, Harmonisasi peraturan dan simplifikasi peraturan.

## Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dalam proses penyusunan naskah hukum, Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial didukung oleh Pejabat fungsional Perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama serta Koordinator Organisasi Hukum dan Humas





Nomor : 1592/5.1/HK.01/10/2022  
Sifat : Biasa  
Hal : Rapat Pembahasan Peraturan Perundang-undangan

10 Oktober 2022

Yth ( nama terlampir)

Menindaklanjuti ditetapkannya Keputusan Menteri Sosial Nomor: 186/HUK/2022 tentang Program Keluarga Harapan dan Program Sembako Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor: 203/HUK/2022 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Tahun 2022, maka perlu dilakukan rapat pembahasan peraturan perundang-undangan untuk membahas dampak hukum atas terbitnya keputusan dimaksud dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial yang sebelumnya telah diterbitkan, bersamaan dengan hal tersebut kami bermaksud mengundang Saudara/i untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 5 Gedung Cawang Kencana Jl. Mayjen Sutoyo No.Kav. 22 Kramat jati, Kota Jakarta Timur - DKI Jakarta

Acara :

a. Rapat Revisi Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor: 158/5/HK.01/9/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode September, Oktober, November, dan Desember Tahun 2022.

b. Rapat Revisi Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor: 120/5/HK.01/8/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sembako.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara/i berkenan untuk hadir atau menunjuk 1 (satu) pejabat atau pegawai yang berkompoten dan berperan aktif memberikan masukan dalam rapat dimaksud dengan mengisi tautan partisipasi berikut <https://forms.gle/cakNuJZzrFs3gdhn6> Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pemberdayaan Sosial



Berni Sujanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

## Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja 5

Kegiatan pokok pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang mendukung Indikator Kinerja 5 adalah

1. Rapat penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
2. Pembahasan peraturan perundang-undangan
3. Koordinasi bidang hukum lingkup Ditjen Dayasos

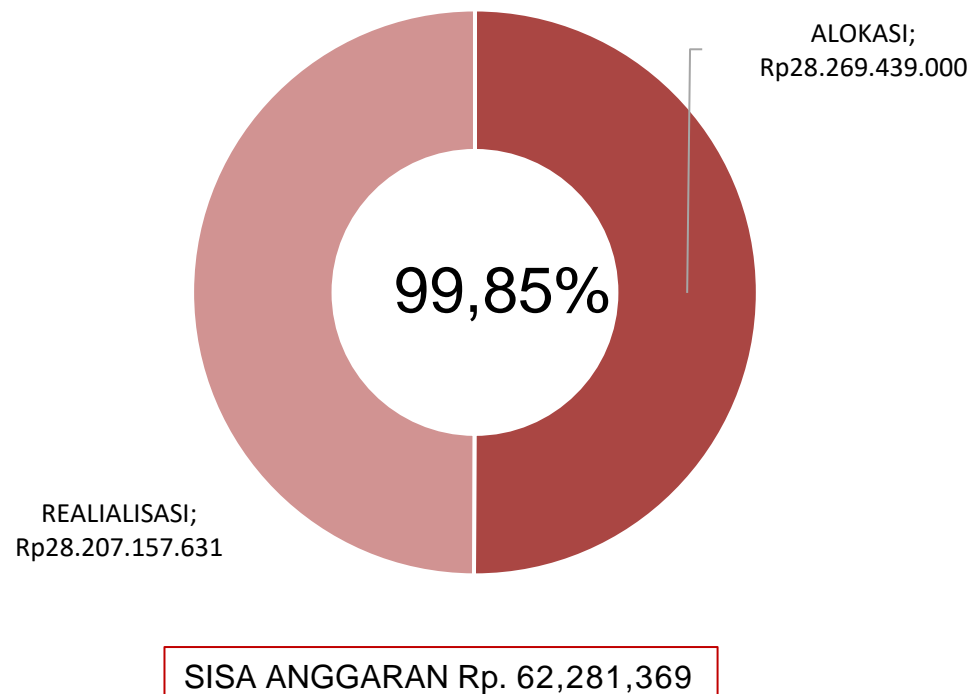


## B. REALISASI ANGGARAN



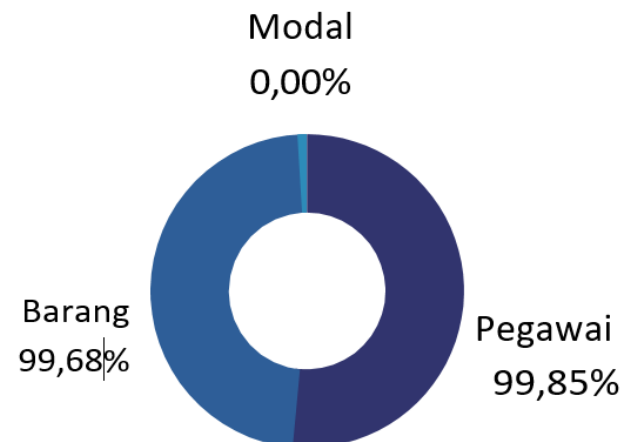
### REALISASI ANGGARAN

### SEKRETARIAT DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2022 (DIPA AKHIR OTK LAMA)



Tahun 2022 terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial. Dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, sehingga terdapat penyesuaian kegiatan sesuai dengan OTK baru tersebut. Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial bekerjasama dengan stakeholders terus berusaha agar pelaksanaan dukungan manajemen berjalan dengan baik.

#### *Persentase Anggaran berdasarkan jenis belanja*

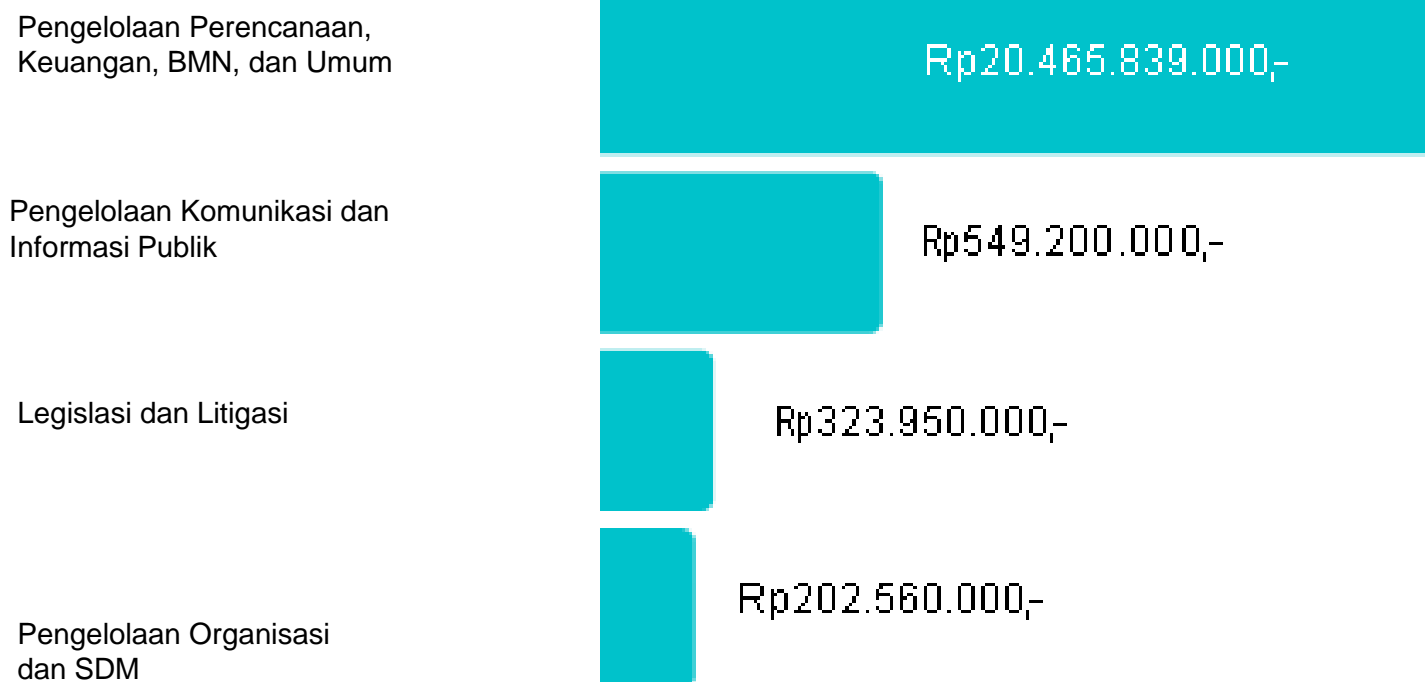




## ASPEK ANGGARAN



Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial pada tahun 2022 mendapatkan anggaran melalui APBN sebesar **Rp21.541.549.000,-** (**Dipa Awal OTK Baru**) dengan rincian seperti grafik berikut.



Anggaran Sekretariat Ditjen Dayasos terbagi menjadi 4 Kegiatan. Porsi terbesar pada kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum.

# KRONOLOGI PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2022

SEKRETARIAT DITJEN  
PEMBERDAYAAN SOSIAL

**DIPA AWAL OTK LAMA**  
**RP 45.763.457.000**

Berdasarkan DIPA  
Petikan Awal No: SP  
DIPA-  
027.03.1.630859/2022  
Tanggal 17 November  
2021



Berdasarkan DIPA Revisi  
ke-9 No: SP DIPA-  
027.03.1.630859/2022  
Tanggal 8 September  
2022

**DIPA AKHIR OTK LAMA**  
**RP 28.269.439.000**

**DIPA AWAL OTK BARU**  
**RP 21.541.549.000**

Berdasarkan DIPA Petikan Awal No: SP DIPA-  
027.03.1.690556/2022

- Semula 5 DIPA, menjadi 1 DIPA Ditjen
- terdapat penambahan anggaran sekretariat pada OTK Baru sebesar Rp2.552.531.000 untuk penambahan belanja non ops, pengalihan blokir AA dan penambahan honor PPNPN



Terdapat pengurangan pagu  
belanja Pegawai sebesar Rp  
1.783.291.000 ke BA-BUN  
berdasarkan Nota dinas Sekretaris  
Jenderal Nomor:  
3497/1/PR.01.01/10/2022 tanggal  
7 Oktober 2022 perihal  
Penyesuaian Belanja Pegawai yang  
berasal dari Blokir AA Belanja  
Kementerian/Lembaga TA 2022.

**DIPA AKHIR OTK BARU**  
**RP 19.758.258.000**

Berdasarkan DIPA Revisi ke-14 No: SP DIPA-  
027.03.1.690556/2022, 28 Desember 2022

## BAB IV PENUTUP





## KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja ini merefleksikan pelaksanaan Renstra Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan menuju terwujudnya visi dan misi Sekretariat Ditjen Pemberdayan Sosial. Dalam proses penetapannya, dilakukan penyempurnaan indikator kinerja selaras dengan indikator Sekretariat lainnya lingkup Kementerian Sosial. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2022. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial dilihat dari 5 Sasaran Kegiatan dengan 14 Indikator. Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial sebesar 106,22%. Capaian Kinerja masing-masing Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

### Sasaran Kegiatan 1

- Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial dengan rata-rata capaian kinerja 88,89%

### Sasaran Kegiatan 2

- Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik UKE 1 dengan rata-rata capaian kinerja 100%

### Sasaran Kegiatan 3

- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum UKE 1 dengan capaian rata-rata kinerja 77,52%

### Sasaran Kegiatan 4

- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM UKE 1 dengan capaian rata-rata kinerja 86,62%

### Sasaran Kegiatan 5

- Meningkatnya Layanan Kualitas Legislasi dan Litigasi UKE 1 dengan capaian rata-rata kinerja 100%

## SARAN

**Dalam upaya meningkatkan kembali capaian di tahun berikutnya maka perlu langkah-langkah sebagai berikut :**

- ✓ Menyesuaikan SDM pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Dengan peta jabatan dan beban kerja.
- ✓ Meningkatkan kapasitas SDM sesuai dengan masing masing jabatannya dengan bimbingan teknis atau diklat.
- ✓ Meningkatkan pemberitaan program pemberdayaan sosial melalui berbagai media online.
- ✓ Memperbaiki implementasi SAKIP lingkup Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial antara lain dalam hal pelaporan kinerja secara online dan evaluasi internal.
- ✓ Memaksimalkan penggunaan SIKD dalam persuratan lingkup Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial dan penataan arsip

## **SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Jl. Salemba Raya No 28, Jakarta Pusat



dayasosbisa



dayasosbisa



Direktorat Jenderal  
Pemberdayaan Sosial